

RINGKASAN EKSEKUTIF INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI KABUPATEN SEMARANG

2018



Ringkasan Eksekutif
Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Semarang
2018

ISSN/ISBN : -
No. Publikasi : 33220.2012
Katalog : 7102012.3322

Ukuran Buku : 14,8 x 21 cm
Jumlah Halaman : ii + 14 halaman/pages

Naskah :
BPS Kabupaten Semarang

Penyunting :
BPS Kabupaten Semarang

Desain Kover oleh :
BPS Kabupaten Semarang

Penerbit :
BPS Kabupaten Semarang

Pencetak :
Badan Pusat Statistik

Sumber Ilustrasi : -

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

Ringkasan Eksekutif

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI (IKK)

KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018

Otonomi Daerah (Otonomi Daerah) yang dilaksanakan sejak 1 Januari 2001 memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Kebijakan Otonomi Daerah yang diundangkan pada tahun 2000 diarahkan untuk mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan di semua daerah. Dengan penerapan kebijakan ini, diharapkan tujuan nasional yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat tercapai secara efektif dan efisien. Tujuan lain dari kebijakan Otonomi Daerah adalah pemerataan kemampuan keuangan antar daerah sehingga ketimpangan antar daerah dapat teratasi. Pemerintah daerah terutama yang masih tertinggal diharapkan mampu mengelola keuangan daerah dan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di daerahnya sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat.

Pembangunan terdesentralisasi yang telah diterapkan selama ini membutuhkan suatu indikator guna perimbangan keuangan daerah otonom. Salah satu dana perimbangan tersebut adalah Dana Alokasi Umum (DAU). DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah

untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 21. DAU merupakan instrumen transfer yang dimaksudkan untuk meminimumkan ketimpangan fiskal antar daerah, sekaligus pemeratakan kemampuan antar daerah.

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) merupakan salah satu komponen utama dalam perumusan Dana Alokasi Umum (DAU) disamping jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), luas wilayah dan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.

Apakah yang dimaksud dengan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) ?

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) adalah angka indeks yang menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota atau provinsi terhadap tingkat kemahalan konstruksi rata-rata nasional. Sebagai salah satu variabel yang digunakan untuk menghitung kebutuhan daerah, IKK berkaitan erat dengan keinginan dan tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan pelayanan dengan membangun sarana dan prasarana yang berupa bangunan fisik, seperti bangunan gedung, jalan, jembatan, saluran irigasi dan lain sebagainya.

Perbedaan kondisi dan potensi geografis di masing-masing wilayah, serta jarak antar wilayah menyebabkan terjadinya perbedaan pembiayaan untuk membangun fasilitas-fasilitas tersebut. Hal inilah yang menjadi dasar digunakannya

Indeks Kemahalan Konstruksi untuk penyesuaian kebutuhan daerah dilihat dari sektor bangunan/ konstruksi. IKK digunakan sebagai *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah. Semakin sulit letak geografis suatu daerah maka diduga semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut.

IKK merupakan angka indeks yang menunjukkan perbandingan harga bahan bangunan atau jasa konstruksi antar lokasi yang berbeda pada periode yang sama dibandingkan dengan suatu kota acuan.

Bagaimana cara menghitung IKK ?

Untuk membandingkan harga konstruksi antar wilayah atau daerah, dikenal ada dua metode penghitungan. Metode yang pertama dengan pendekatan input dan yang kedua pendekatan harga output.

Pendekatan harga input yaitu dengan mencatat semua material penting yang digunakan digabung dengan upah dan sewa peralatan sesuai dengan bobotnya masing-masing. Kelemahan metode ini adalah bahwa kegiatan konstruksi dianggap mempunyai produktivitas yang sama dan tidak mempertimbangkan *overhead cost*.

Pendekatan harga output dilakukan dengan cara menanyakan harga konstruksi yang sudah jadi. Pada harga output kelemahannya yaitu dalam harga bangunan sudah termasuk biaya manajemen dan keuntungan kontraktor yang bervariasi antar daerah dan antar proyek sehingga tidak

memadai untuk tujuan membandingkan kemahalan konstruksi antar wilayah.

Alternatifnya adalah mengumpulkan harga konstruksi yang mencakup *overhead cost* dan produktivitas pekerja tanpa memasukkan biaya manajemen dan keuntungan kontraktor. Caranya ialah dengan mengumpulkan harga komponen bangunan seperti harga dinding, atap dan sebagainya.

Setelah harga-harga komponen tersebut digabungkan, maka akan didapat harga total proyek yang besarnya berada diatas harga input, tetapi dibawah harga output. Hal ini karena sudah memasukkan *overhead cost* dan upah tetapi mengeluarkan biaya manajemen dan keuntungan kontraktor. Data ini dapat diperoleh dari *Bill of Quantity* (BoQ) suatu proyek yang sudah selesai.

IKK sudah dihitung sejak tahun 2003. Penimbang yang digunakan untuk menghitung IKK adalah BoQ tahun 2003. Perkembangan teknik sipil sangat cepat ditambah lagi dengan pesatnya industri bahan bangunan. Saat ini material yang digunakan untuk kegiatan konstruksi sudah banyak berubah atau muncul model baru seperti batako ringan, atap baja ringan, kusen aluminium, dsb. Peraturan pemerintah baik pusat maupun daerah yang mempengaruhi kegiatan konstruksi juga banyak berubah. Hal – hal tersebut mengakibatkan BoQ 2003 yang selama ini digunakan untuk menghitung IKK tidak lagi sesuai dengan kondisi di lapangan. Oleh karena itu, mulai tahun 2013 penghitungan IKK sudah menggunakan BoQ terbaru yang

dikumpulkan pada tahun 2012. Sedangkan IKK tahun 2018 menggunakan penimbang yang lebih lengkap dan *up to date* dengan menggunakan updating BoQ sampai tahun 2017.

IKK tahun 2018 menggunakan data harga komoditi konstruksi, sewa alat berat dan upah jasa konstruksi yang dikumpulkan dalam 4 periode pencacahan yaitu Juli 2017, Oktober 2017, Januari 2018, dan April 2018. Seperti halnya IKK tahun sebelumnya, IKK tahun 2018 menggunakan 4 periode pencacahan dikarenakan periode tersebut mencakup masa perencanaan dan pembangunan suatu proyek konstruksi.

Kota acuan pada penghitungan IKK 2018 adalah Kota Semarang, berbeda dengan kota acuan IKK sebelumnya yaitu Kota Surabaya untuk IKK 2015-2017 dan Kota Samarinda untuk IKK 2012-2014. Pemilihan kota acuan didasarkan pada wilayah yang memiliki indeks mendekati rata-rata nasional dengan mempertimbangkan kelengkapan sumber data.

Peta topografi berikut memberikan gambaran mengenai wilayah dataran tinggi, pegunungan dan dataran rendah. Suatu kabupaten yang terletak di pegunungan biasanya memiliki akses distribusi barang yang sulit.

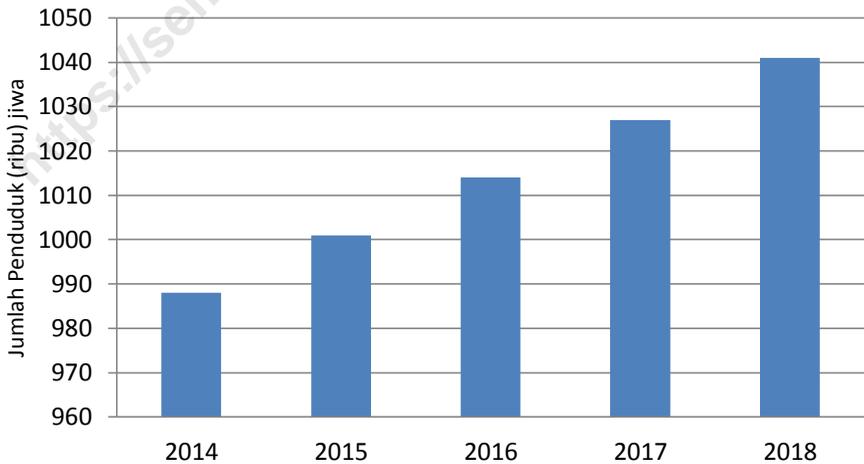
Hal ini menyebabkan tingginya harga suatu komoditas di daerah tersebut akibat dari transportasi yang langka. Kondisi ini umum terjadi di kabupaten di luar pulau Jawa.

Gambar 1. Peta Topografi Wilayah Jawa



Sumber : www.naturearthdata.com

Gambar 2. Proyeksi Jumlah Penduduk di Kabupaten Semarang Tahun 2014-2018



Sumber : Proyeksi Penduduk Berdasarkan Hasil SP 2010

Kabupaten Semarang secara geografis terletak pada $110^{\circ}14'54,75''$ sampai dengan $110^{\circ}39'3''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}3'57''$ sampai dengan $7^{\circ}30'$ Lintang Selatan. Keempat koordinat bujur dan lintang tersebut membatasi wilayah seluas 950,21 km².

Kabupaten Semarang terbagi dalam 19 kecamatan dan 235 desa/kelurahan. Wilayahnya sebagian besar merupakan daratan tinggi dengan ketinggian rata-rata 544,21 meter di atas permukaan air laut. Secara administratif letak geografis Kabupaten Semarang berbatasan langsung dengan 8 Kabupaten/Kota, selain itu di tengah-tengah wilayah Kabupaten Semarang terdapat Kota Salatiga dan Danau Rawa Pening.

Wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kota Semarang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak dan Kabupaten Boyolali, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Boyolali. Adapun sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang.

Jumlah penduduk Kabupaten Semarang pada tahun 2018 berdasarkan data proyeksi penduduk sebanyak 1.040.629 orang, jumlah ini meningkat 13.140 orang atau 1,28% dibanding tahun 2017. Menurut jenis kelamin, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding jumlah penduduk laki-laki. Hal ini ditunjukkan dengan angka *sex ratio* sebesar 96.

Secara rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Semarang sebesar 1.095 orang/km², kecamatan dengan kepadatan penduduk terbesar adalah Kecamatan Ungaran Barat, Kecamatan Ambarawa, dan Kecamatan Ungaran Timur, masing-masing dengan kepadatan penduduk mencapai 2.424 orang/km², 2.239 orang/km² dan 2.216 orang/km².

Tabel 1. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2018

No	Kode Kabupaten/Kota	IKK	No	Kode Kabupaten/Kota	IKK
1	3301 Kab Cilacap	96,18	19	3319 Kab Kudus	99,84
2	3302 Kab Banyumas	95,99	20	3320 Kab Jepara	105,11
3	3303 Kab Purbalingga	95,14	21	3321 Kab Demak	103,56
4	3304 Kab Banjarnegara	101,13	22	3322 Kab Semarang	103,83
5	3305 Kab Kebumen	89,04	23	3323 Kab Temanggung	93,46
6	3306 Kab Purworejo	94,63	24	3324 Kab Kendal	101,13
7	3307 Kab Wonosobo	102,15	25	3325 Kab Batang	94,16
8	3308 Kab Magelang	88,02	26	3326 Kab Pekalongan	100,91
9	3309 Kab Boyolali	95,04	27	3327 Kab Pemalang	103,31
10	3310 Kab Klaten	99,57	28	3328 Kab Tegal	86,34
11	3311 Kab Sukoharjo	99,07	29	3329 Kab Brebes	105,87
12	3312 Kab Wonogiri	99,62	30	3371 Kota Magelang	99,83
13	3313 Kab Karanganyar	98,27	31	3372 Kota Surakarta	98,82
14	3314 Kab Sragen	100,29	32	3373 Kota Salatiga	98,51
15	3315 Kab Grobogan	104,69	33	3374 Kota Semarang	100,00
16	3316 Kab Blora	101,26	34	3375 Kota Pekalongan	98,04
17	3317 Kab Rembang	102,38	35	3376 Kota Tegal	98,32
18	3318 Kab Pati	102,66			

Sumber : Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota 2018

Gambar 3. Peta Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018



Sumber : Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota 2018

IKK terdiri dari IKK kabupaten/kota dan provinsi, yaitu angka yang menunjukkan perbandingan tingkat kemahalan harga bangunan/ konstruksi (TKK) secara umum dari suatu daerah terhadap daerah lainnya. TKK merupakan cerminan dari suatu nilai bangunan/ konstruksi atau biaya yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan/ konstruksi per satuan ukuran luas di suatu kabupaten/kota atau provinsi yang diperoleh melalui pendekatan terhadap sejumlah bahan bangunan dan jasa yang menjadi paket komoditas.

IKK merupakan indeks spasial yang digunakan untuk membandingkan tingkat kemahalan konstruksi suatu wilayah terhadap wilayah yang menjadi kota acuan. Indeks ini tidak dapat dibandingkan antar waktu, tetapi hanya membandingkan antar wilayah.

Pada tahun 2018, kota di Indonesia yang menjadi kota acuan adalah Kota Semarang (IKK = 100). Pemilihan kota acuan didasarkan pada wilayah yang memiliki indeks mendekati rata-rata nasional dengan mempertimbangkan kelengkapan sumber data. Semakin besar IKK menunjukkan relatif semakin tinggi harga bahan bangunan/ konstruksi di wilayah tersebut dibandingkan dengan kota acuan. Harga bahan bangunan atau konstruksi dan harga sewa alat berat di suatu daerah diduga dipengaruhi oleh letak geografis dan kemampuan daerah tersebut dalam menyediakan bahan bangunan secara mandiri.

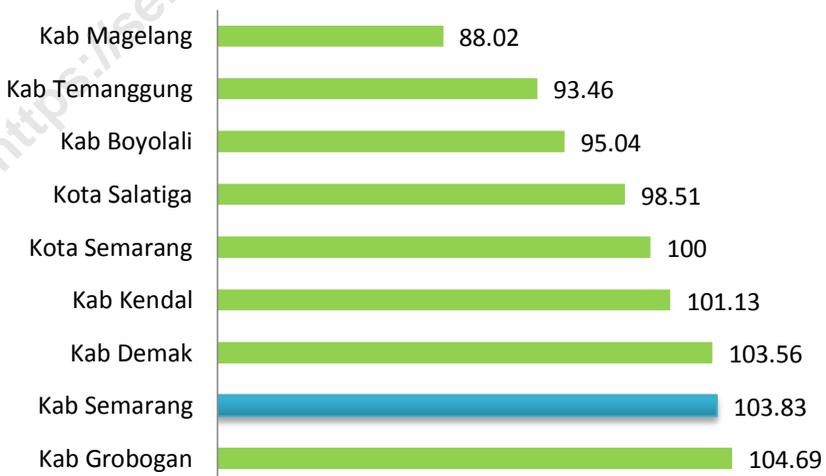
Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 sebesar 98,64. Berdasarkan angka ini dapat dikatakan bahwa kondisi geografis Provinsi Jawa Tengah tergolong mudah dan tingkat kemahalan konstruksi lebih rendah dibandingkan kota Semarang yang dijadikan kota acuan secara nasional.

Pada tahun 2018, IKK terendah untuk level provinsi adalah Kabupaten Tegal dengan indeks sebesar 86,34. Sedangkan nilai IKK tertinggi untuk level provinsi adalah Kabupaten Brebes dengan indeks 105,87.

IKK Kabupaten Semarang sebesar 103,83 dan menempati urutan ke 32 dari 35 kabupaten/kota pada level Provinsi Jawa Tengah (jika diurutkan dari nilai IKK terendah di Provinsi Jawa Tengah). IKK Kabupaten Semarang lebih tinggi dari IKK Jawa Tengah secara umum. Artinya, tingkat kemahalan konstruksi di Kabupaten Semarang secara umum lebih tinggi dibandingkan wilayah lain di Jawa Tengah.

Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota tetangga, secara umum IKK Kabupaten Semarang lebih tinggi dibandingkan nilai IKK Kabupaten Demak (103,56), IKK Kabupaten Kendal (101,13), IKK Kota Semarang (100), IKK Kota Salatiga (98,51), IKK Kabupaten Boyolali (95,04), IKK Kabupaten Temanggung (93,46) dan IKK Kabupaten Magelang (88,02). Namun lebih rendah dibandingkan dengan nilai IKK Kabupaten Grobogan (104,69).

Gambar 7. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota Tahun 2018



Sumber : Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota 2018

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang, kondisi jalan pada tahun 2018 masih menunjukkan 6 persen jalan kondisi rusak ringan dan 4 persen jalan dalam kondisi rusak berat. Dalam hal ini pembangunan dan perbaikan infrastruktur merupakan program yang lebih diutamakan dalam memudahkan akses penduduk dalam kegiatan ekonominya.

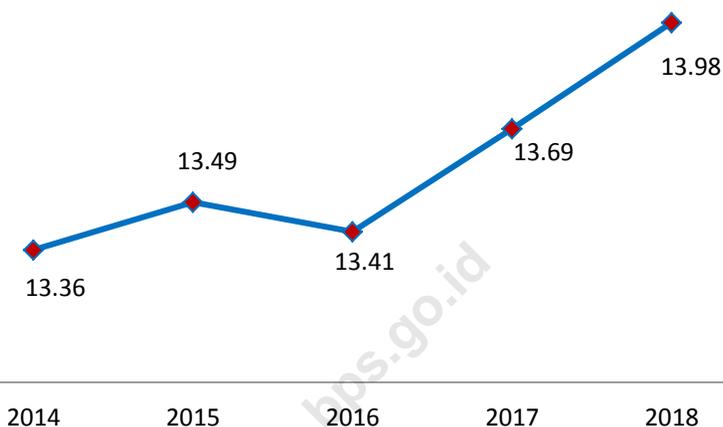
Gambar 4. Persentase Panjang Jalan Kabupaten Semarang Menurut Kondisi Jalan Tahun 2018



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang

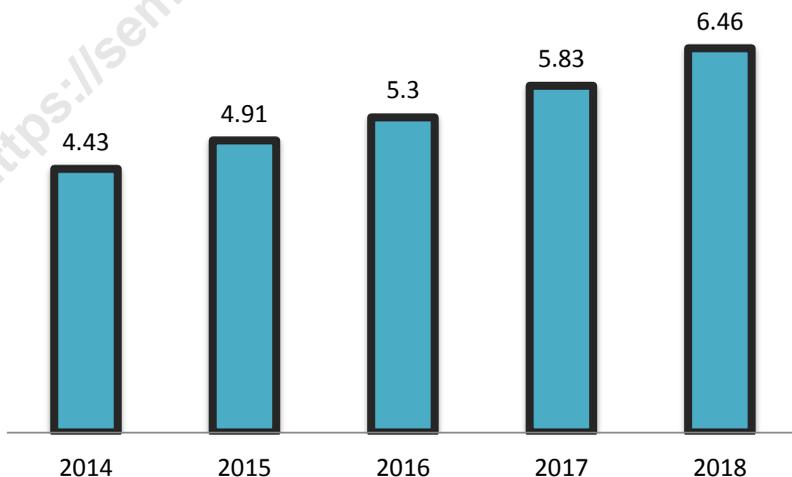
Dari sisi pertumbuhan PDRB, kontribusi sektor konstruksi terhadap Produk Domestik Regional Bruto dalam kurun waktu 2014-2018 mengalami pertumbuhan yang positif. Kondisi ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun ini, sektor konstruksi di Kabupaten Semarang telah berkembang dan menjadi sektor yang potensial serta berperan penting dalam pembangunan di Kabupaten Semarang.

Gambar 5. Kontribusi Sektor Konstruksi terhadap Total PDRB ADHB Kabupaten Semarang Tahun 2014-2018 (persen)



Sumber : Kabupaten Semarang Dalam Angka 2019

Gambar 6. Kontribusi Sektor Konstruksi terhadap Total PDRB ADHB Kabupaten Semarang Tahun 2014-2018 (triliun rupiah)



Sumber : Kabupaten Semarang Dalam Angka 2019

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2017; bps.go.id

Badan Pusat Statistik. Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi dan Kabupaten/Kota 2018; bps.go.id

Badan Pusat Statistik. Kabupaten Semarang Dalam Angka 2019; semarangkab.bps.go.id

<https://semarangkab.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SEMARANG**

Jl. Garuda No.7 Ungaran Telp./Fax. (024) 6921029

Homepage : semarangkab.bps.go.id Email : bps3322@bps.go.id